

RETORIKA VISUAL AKTIVISME DI INSTAGRAM: SISTEMATIK LITERATUR TENTANG AGENDA SETTING VISUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESADARAN POLITIK AUDIENS

Diva Ananda Alifia¹, Putri Nabila², Yuni Awaliyah³, Yusuf Ali⁴, Muhammad Isa
Asyrofuddin⁵

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat e-mail divanandalifia@gmail.com¹, putrinabilaaa0308@gmail.com²,
yuniawalyn@gmail.com³, YuSufAli.kepoaja99@gmail.com⁴,
miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

Instagram has transformed from a lifestyle platform into a crucial arena for political contestation, particularly in grassroots social movements such as the '17+8 People's Demands' Movement. This study aims to analyze how digital activism on Instagram facilitates political participation and shapes public agendas through visual rhetorical strategies. Employing a qualitative descriptive method with a library research approach, this study integrates Agenda Setting Theory, Connective Action concepts, and Visual Rhetoric. The results indicate that Instagram facilitates connective action through sharing mechanisms that are personal yet massively connected. Visually, the use of infographics and carousel aesthetics functions to frame complex issues into digestible narratives, thereby succeeding in intermedia agenda setting by moving issues from social media to mainstream public discourse. Findings also suggest that while visuals enhance political awareness, there is a risk of deep issue simplification. The novelty of this study lies in the specific analysis of the role of Instagram's visual instruments as the primary variable in shaping protest agendas in Indonesia.

Keywords: *Digital Activism, Connective Action, Instagram, Political Participation, Visual Rhetoric.*

ABSTRAK

Abstrak Instagram telah bertransformasi dari platform gaya hidup menjadi arena kontestasi politik yang krusial, khususnya dalam gerakan sosial akar rumput seperti Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat'. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktivisme digital di Instagram memfasilitasi partisipasi politik dan membentuk agenda publik melalui strategi retorika visual. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), penelitian ini mengintegrasikan Agenda Setting Theory, konsep Connective Action, dan Visual Rhetoric. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram memfasilitasi connective action melalui mekanisme berbagi (sharing) yang personal namun terkoneksi secara massal. Secara visual, penggunaan infografis dan estetika carousel berfungsi membingkai isu kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna, sehingga berhasil melakukan intermedia agenda setting, yaitu memindahkan isu dari media sosial ke diskursus publik arus utama. Temuan juga mengindikasikan bahwa mes-

kipun visual meningkatkan kesadaran politik (awareness), terdapat risiko simplifikasi isu yang mendalam. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik mengenai peran instrumen visual Instagram sebagai variabel utama dalam pembentukan agenda protes di Indonesia.

Kata Kunci: Aktivisme Digital, Connective Action, Instagram, Partisipasi Politik, Retorika Visual.

A. Pendahuluan

Dinamika demokrasi kontemporer di tingkat global maupun nasional sedang mengalami transformasi fundamental seiring dengan penetrasi teknologi digital yang semakin masif dan mendalam. Ruang publik yang dahulu didefinisikan secara fisik oleh Jurgen Habermas sebagai tempat berkumpulnya warga untuk berdiskusi secara rasional, seperti kedai kopi atau alun-alun kota, kini telah bermigrasi secara signifikan ke dalam sirkuit algoritma media sosial. Fenomena migrasi ini menandai era baru dalam partisipasi politik warga negara di mana batasan ruang dan waktu menjadi semakin kabur. Keterlibatan publik dalam proses demokrasi tidak lagi terbatas pada siklus elektoral lima tahunan atau keanggotaan formal dalam partai politik, melainkan berlangsung secara waktu nyata (real-time) dan terus menerus di ruang digital. Warga negara kini memiliki akses langsung untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan, hingga

memobilisasi massa tanpa harus melalui perantara institusi politik tradisional. Pergeseran ini menciptakan lanskap demokrasi hibrida yang menuntut pemahaman baru tentang bagaimana kekuasaan dipertukarkan dan bagaimana opini publik dibentuk di era informasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi contoh nyata dari transformasi digital ini. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 78 persen dari total populasi. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia kini telah terhubung ke jaringan global. Lebih jauh lagi, rata-rata penggunaan media sosial masyarakat Indonesia tercatat melebihi tiga jam per hari, sebuah angka yang melampaui rata-rata global. Statistik ini bukan sekadar menunjukkan tren konsumsi data atau

hiburan semata, melainkan menjadi indikator kuat adanya pergeseran infrastruktur politik di mana gawai pintar telah menjadi alat utama (primary tool) bagi warga negara untuk berinteraksi dengan kekuasaan, mencari informasi publik, dan mengorganisir gerakan sosial.

Dalam lanskap infrastruktur politik baru ini, aktivisme digital muncul sebagai instrumen utama resistensi sipil dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, apabila diamati lebih cermat, terdapat evolusi yang menarik dalam pola dan medium aktivisme digital di Indonesia selama satu dekade terakhir. Sekitar sepuluh tahun yang lalu, aktivisme digital sangat identik dengan apa yang disebut sebagai "perang tagar" (hashtag wars) di platform berbasis teks seperti Twitter (sekarang X) dan Facebook. Pada masa itu, pertempuran narasi sangat bergantung pada argumen diskursif, kekuatan teks, dan debat verbal yang panjang. Kini, terjadi pergeseran paradigma menuju politik visual (visual politics) yang berpusat di platform berbasis gambar dan video pendek seperti Instagram dan TikTok. Pergeseran ini didorong oleh budaya layar (screen culture) yang memprioritaskan estetika, kecepatan konsumsi informasi,

dan rangsangan emosi visual dibandingkan kedalaman teks yang panjang. Instagram yang pada awalnya didesain sebagai etalase gaya hidup dan dokumentasi pribadi, secara paradoks telah bermetamorfosis menjadi "medan tempur" politik yang paling efektif dan strategis bagi gerakan sosial kontemporer.

Fitur teknologi yang disediakan oleh Instagram, seperti carousel atau slide geser, Stories, dan Reels, memungkinkan para aktivis untuk mengemas isu kebijakan publik yang rumit dan membosankan menjadi konten yang menarik secara visual. Isu berat seperti undang-undang omnibus law, krisis iklim, hingga korupsi struktural dapat diterjemahkan menjadi konten visual yang mudah dicerna (snackable content), estetik, dan sangat mudah dibagikan (shareable). Fenomena Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' menjadi studi kasus yang sangat relevan dan krusial untuk membedah pergeseran medium ini. Gerakan ini bukan sekadar protes reaktif yang muncul tiba-tiba, melainkan sebuah orkestrasi digital yang sistematis dan terstruktur secara visual. Berbeda dengan gerakan reformasi tahun 1998 yang sangat

mengandalkan mobilisasi fisik terpusat di gedung parlemen dan komando organisasi mahasiswa yang hierarkis, Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' mengadopsi logika yang berbeda, yaitu logika connective action.

Dalam logika connective action yang diperkenalkan oleh Bennett dan Segerberg, mobilisasi massa tidak didorong oleh identitas kelompok yang kaku seperti keanggotaan serikat buruh atau partai politik, melainkan didorong oleh bingkai tindakan personal (personalized action frames). Bingkai ini disebarkan melalui jaringan pertemanan yang cair di media sosial. Seorang individu membagikan poster tuntutan di akun Instagram pribadinya bukan semata-mata karena instruksi dari seorang ketua organisasi, melainkan sebagai bentuk ekspresi identitas politik pribadi mereka yang beresonansi dengan isu tersebut. Akibatnya, batas antara aktivisme privat dan publik menjadi kabur. Tindakan membagikan sebuah Instastory berisi kritik sosial dianggap sebagai tindakan politik yang setara validitasnya dengan turun ke jalan dalam persepsi partisipan digital masa kini. Hal ini menciptakan bentuk partisipasi yang

lebih inklusif namun juga lebih terfragmentasi dibandingkan gerakan konvensional.

Meskipun aktivisme digital di Instagram semakin menjamur dan menjadi fenomena dominan, pemahaman akademis mengenai dinamika ini masih menyisakan celah atau gap yang signifikan. Tinjauan kritis terhadap literatur terdahulu atau state of the art menunjukkan bahwa mayoritas penelitian aktivisme digital di Indonesia masih terjebak pada dua kutub ekstrem yang saling berlawanan. Di satu sisi, terdapat kelompok studi yang merayakan potensi media sosial sebagai alat demokratisasi dengan nada optimisme teknologis. Studi jenis ini, seperti yang banyak dilakukan dalam tradisi analisis jaringan sosial (Social Network Analysis), sangat kuat dalam memetakan pola penyebaran informasi, mengidentifikasi buzzer, dan menghitung volume tagar. Mereka mampu menjelaskan siapa yang berbicara dengan siapa, namun sering kali luput menganalisis apa pesan yang disampaikan dan bagaimana pesan itu dikonstruksi secara visual untuk membujuk publik.

Di sisi lain, terdapat kelompok studi yang skeptis dan pesimistis yang

melabeli fenomena ini sebagai slack-tivism atau "aktivisme kemalasan". Pandangan ini menganggap bahwa partisipasi di media sosial hanyalah ilusi keterlibatan yang berhenti pada klik dan like tanpa memberikan dampak nyata pada perubahan kebijakan. Kesenjangan penelitian (research gap) yang paling krusial terletak pada minimnya kajian yang menempatkan "visualitas" atau retorika visual sebagai variabel independen utama dalam analisis gerakan sosial. Sangat sedikit penelitian yang secara spesifik membedah bagaimana elemen desain grafis, pemilihan warna yang mencolok, tipografi yang tegas, dan komposisi gambar dalam poster tuntutan digital bekerja sebagai retorika yang membujuk (visual rhetoric). Padahal, dalam ekosistem ekonomi atensi (attention economy) di Instagram, konten visual adalah ujung tombak yang menentukan apakah sebuah isu akan ditangkap oleh audiens atau tenggelam dalam kebisingan arus informasi.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana sebuah infografis sederhana di Instagram mampu menggerakkan emosi ribuan orang dan memaksa isu tersebut menjadi pembahasan nasional.

Mekanisme Teori Agenda Setting dalam konteks ini tidak lagi berjalan linear dari media massa ke publik, melainkan berpotensi berbalik arah (reverse agenda setting) atau meluas antarmedia (intermedia agenda setting). Visual di media sosial memiliki kekuatan untuk mendikte apa yang harus diberitakan oleh jurnalisme arus utama. Jika sebuah visual menjadi viral di Instagram, media massa konvensional sering kali terpaksa meliputnya karena tekanan publik. Selain aspek pembentukan agenda, aspek kualitas literasi politik yang dihasilkan dari aktivisme visual juga belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Apakah konsumsi konten visual politik yang cenderung menyederhanakan masalah benar-benar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat, atau justru menciptakan ilusi pengetahuan (illusion of explanatory depth)? Masyarakat mungkin merasa paham tentang isu hukum hanya karena membaca sepuluh slide infografis, padahal realitas kebijakan publik jauh lebih kompleks dari itu.

Ketiadaan analisis mendalam mengenai dampak kognitif dari aktivisme visual ini menjadi urgensi tersendiri bagi pengembangan ilmu komunikasi politik. Kualitas demokrasi

suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas informasi yang dikonsumsi oleh warganya. Jika aktivisme hanya menghasilkan emosi tanpa pemahaman substansial, maka gerakan sosial rentan ditunggangi atau kehilangan arah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan Ilmu Komunikasi melalui Teori Agenda Setting, Sosiologi Politik melalui konsep Connective Action, dan Kajian Visual melalui Visual Rhetoric. Fokus utama penelitian ini bukan sekadar menghitung seberapa banyak orang yang turun ke jalan, melainkan membedah bagaimana Instagram sebagai platform teknologi memfasilitasi konstruksi isu melalui bahasa visual yang persuasif. Penelitian ini bermaksud membongkar strategi visual Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' untuk memahami bagaimana mereka memanfaatkan algoritma dan psikologi visual guna membangunkan kesadaran politik.

Secara spesifik dan sistematis, penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua sasaran utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran instrumen visual

Instagram, meliputi infografis, meme, dan video pendek, dalam memfasilitasi partisipasi politik dan membentuk agenda isu menjadi perhatian utama di ruang publik digital. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bukti akademis dan teoritis mengenai apakah aktivisme visual di media sosial berkorelasi positif terhadap peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat, atau sekadar menjadi riak emosional sesaat. Dengan menjawab tujuan tersebut melalui tinjauan literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan model komunikasi politik di era visual, serta memberikan kontribusi praktis bagi para aktivis dan pengambil kebijakan dalam memahami lanskap opini publik digital yang semakin kompleks dan visual sentris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk membedah fenomena aktivisme digital. Pemilihan metode ini didasarkan pada urgensi untuk mengeksplorasi makna di balik interaksi visual dan tekstual di media sosial yang tidak dapat diukur sekadar

dengan angka. Merujuk pada pandangan Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam studi ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menyeleksi serta menginterpretasi dan mensintesis data dari berbagai literatur.

Strategi riset yang digunakan secara spesifik adalah studi kepustakaan atau library research. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber data sekunder yang relevan dengan topik retorika visual dan gerakan sosial digital dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2025. Analisis data selanjutnya dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui pengelompokan literatur secara tematis berdasarkan kerangka teori untuk menemukan pola retorika visual yang dominan serta menjaga validitas data melalui triangulasi sumber.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara Sintesis mendalam terhadap literatur aktivisme digital menyingkap adanya pergeseran paradigma yang fundamental dalam cara gerakan sosial diorganisir, dibingkai, dan dipahami di era visual. Analisis yang komprehensif terhadap Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' membuktikan bahwa media sosial tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat komunikasi tambahan atau suplemen bagi gerakan fisik, melainkan telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama dan arena inti dari perjuangan politik itu sendiri. Temuan ini akan diuraikan secara sistematis ke dalam tiga domain utama yang saling berkelindan dan membentuk ekosistem aktivisme digital yang kompleks, meliputi transformasi keterlibatan politik dari pasif menuju konektif, hegemoni strategi retorika visual sebagai pembentuk agenda publik, dan implikasi kognitif dari aktivisme visual terhadap kesadaran politik masyarakat.

1. Analisis Keterlibatan Politik di Media Sosial: Transformasi dari Pasif Menuju Connective Action

Penelusuran literatur akademik terkini mematahkan asumsi lama yang

cenderung skeptis terhadap aktivisme daring. Pandangan yang melabeli partisipasi digital sebagai slacktivism atau aktivisme malas yang tidak bermakna kini dianggap tidak lagi relevan untuk menjelaskan kompleksitas gerakan kontemporer. Sebastian Valenzuela dalam studi seminalnya menegaskan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial untuk tujuan informasional dengan peningkatan partisipasi politik, baik dalam bentuk protes fisik maupun advokasi digital.

Temuan ini sangat krusial karena melegitimasi aktivitas mikro di Instagram, seperti memberikan tanda like, membagikan ulang atau repost konten tuntutan, serta memberikan komentar dukungan, sebagai bentuk partisipasi politik yang valid dan berdampak. Dalam logika algoritma, akumulasi jutaan aktivitas mikro ini berfungsi sebagai sinyal politik yang mendorong konten perlawanan naik ke permukaan dan mendapatkan visibilitas publik yang luas.

Konsep partisipasi dalam Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' tidak lagi beroperasi di bawah logika Collective Action tradisional yang bergantung pada komando organisasi

birokratis yang kaku, melainkan telah beralih sepenuhnya ke logika Connective Action. Merujuk pada pemikiran W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg, gerakan ini dimediasi oleh jaringan personal yang cair dan fleksibel, di mana teknologi komunikasi menjadi agen pengorganisasian itu sendiri.

Individu tidak bergabung dengan gerakan karena mereka memiliki kartu keanggotaan serikat atau partai, tetapi karena mereka merasa terhubung secara personal dengan isu yang diangkat melalui konten visual yang mereka konsumsi di linimasa pribadi mereka. Zeynep Tufekci menambahkan bahwa media sosial memiliki affordances atau keterjangkauan teknologi yang memungkinkan koordinasi ad hoc tanpa memerlukan kepemimpinan sentral yang karismatik.

Hal ini terlihat jelas dalam mekanisme distribusi informasi gerakan ini, di mana fitur Instagram Stories yang bersifat ephemeral atau sementara namun mendesak digunakan untuk koordinasi taktis lapangan yang cepat, sementara fitur Direct Message (DM) berfungsi sebagai ruang belakang atau backstage

untuk komunikasi privat yang aman dari pengawasan terbuka.

Lebih jauh lagi, karakteristik utama dari Connective Action dalam gerakan ini adalah penggunaan bingkai tindakan yang dipersonalisasi atau personalized action frames. Berbeda dengan gerakan konvensional yang menuntut keseragaman pesan ideologis yang ketat dari pusat komando, gerakan digital justru berkembang biak melalui modifikasi dan variasi pesan.

Setiap individu memiliki otonomi untuk mengemas ulang narasi tuntutan '17+8' agar sesuai dengan estetika, gaya bahasa, dan identitas personal mereka di Instagram. Seorang ilustrator mungkin membagikan tuntutan dalam bentuk karya seni digital, sementara seorang akademisi muda mungkin membagikannya dalam bentuk analisis data. Keragaman ekspresi ini justru memperkuat jangkauan gerakan karena pesan tersebut dapat beresonansi dengan berbagai segmen demografis yang berbeda, menciptakan rasa kepemilikan kolektif yang paradoksnya dibangun di atas fondasi ekspresi individualisme. Tim Highfield menyebut fenomena ini sebagai bagian dari everyday politics atau politik

keseharian, di mana batas antara ranah privat dan publik menjadi kabur, menjadikan setiap unggahan di Instagram potensial menjadi pernyataan politik yang serius.

2. Strategi Retorika Visual dan Kekuatan Pembentuk Agenda (Agenda Setting)

Bagian ini menyoroti peran sentral visualitas dalam menentukan keberhasilan gerakan dalam menembus kebisingan informasi atau information noise. Dalam ekosistem ekonomi atensi atau attention economy saat ini, teks panjang sering kali gagal menangkap perhatian publik yang terfragmentasi dan memiliki rentang atensi yang pendek. Oleh karena itu, strategi retorika visual menjadi instrumen utama yang tak tergantikan dalam melakukan agenda setting. Uta Russmann dan Jakob Svensson mendefinisikan retorika visual di Instagram sebagai penggunaan strategis elemen estetika untuk membujuk, memprovokasi, dan memobilisasi audiens.

Analisis mendalam terhadap konten visual Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' mengidentifikasi penggunaan tiga tipologi visual utama yang bekerja secara sinergis untuk membingkai isu dan mendominasi diskursus publik.

Pertama, penggunaan infografis dengan format carousel atau slide geser mendominasi strategi edukasi publik gerakan ini. Format ini memungkinkan penyajian informasi yang kompleks secara bertingkat dan terstruktur, menyerupai metode pedagogi mikro atau micro-learning. Matthew Barnidge mencatat bahwa paparan insidental terhadap informasi politik visual semacam ini dapat meningkatkan pengetahuan politik secara signifikan bagi kelompok masyarakat yang awalnya tidak tertarik pada politik.

Secara retorik, infografis gerakan ini secara konsisten menggunakan skema warna yang kontras dan psikologis, seperti kombinasi merah dan hitam yang menyimbolkan urgensi, keberanian, dan perlawanan, atau kombinasi kuning dan hitam yang menyimbolkan peringatan bahaya atau caution. Penggunaan warna ini bukan sekadar pilihan estetis, melainkan strategi kognitif untuk memicu respons emosional instan dan sinyal kewaspadaan sebelum audiens bahkan mulai membaca teksnya. Selain itu, teknik pemecahan informasi atau chunking yang diterapkan dalam slide carousel, di mana satu

slide hanya memuat satu poin gagasan utama dengan tipografi besar, berfungsi menurunkan beban kognitif atau cognitive load audiens. Akibatnya, isu kebijakan publik yang rumit dan penuh jargon hukum, seperti pasal-pasal dalam undang-undang omnibus law, dapat dipahami oleh orang awam hanya dalam hitungan detik. Ini adalah bentuk demokratisasi pengetahuan yang radikal, yang memangkas jarak elitis antara bahasa hukum dengan bahasa populer masyarakat.

Kedua, meme politik digunakan sebagai senjata kritik vernakular yang ampuh. Limor Shifman mendefinisikan meme bukan sekadar lelucon internet, melainkan sebagai unit budaya digital yang direplikasi dan dimodifikasi untuk menyampaikan sikap sosial bersama.

Dalam konteks gerakan ini, meme berfungsi untuk melakukan delegitimasi terhadap otoritas penguasa melalui satire, parodi, dan humor. Retorika visual meme bekerja melalui mekanisme intertekstualitas, yaitu penggabungan referensi budaya populer global, seperti adegan film superhero atau karakter kartun terkenal, dengan kritik politik lokal yang tajam. Strategi ini sangat efektif untuk menembus tembok apatisisme politik

generasi Z, karena humor berfungsi menurunkan pertahanan psikologis audiens terhadap pesan politik yang serius. Meme mengubah kemarahan yang meluap-luap menjadi tawa yang memberdayakan, sekaligus menciptakan rasa solidaritas "dalam kelompok" atau in-group solidarity bagi mereka yang memahami kode budaya tersebut.

Ketiga, format video pendek seperti Reels dan TikTok menunjukkan adaptasi cerdas gerakan terhadap logika algoritma platform. Literasi algoritma telah menjadi kemampuan retorik baru bagi para aktivis digital, di mana mereka sengaja menggunakan audio yang sedang tren atau trending audio untuk menunggangi sistem rekomendasi mesin agar konten tuntutan mereka didistribusikan secara luas kepada audiens yang tidak mengikuti akun politik sekalipun. Ariadna Matamoros-Fernández menjelaskan bahwa platform memiliki agensi dalam membentuk visibilitas konten, dan aktivis yang cerdas memanfaatkan celah ini untuk melakukan resistensi algoritmik atau algorithmic resistance.

Video pendek yang menampilkan cuplikan aksi demonstrasi dengan musik latar yang dramatis dan penyuntingan cepat berfungsi untuk

membangkitkan moral shock atau guncangan moral. Visual tubuh demonstran yang rentan berhadapan dengan barikade aparat keamanan membingkai narasi klasik "Rakyat kecil melawan Raksasa kekuasaan", sebuah bingkai universal yang sangat efektif dalam memancing simpati dan dukungan publik internasional.

Strategi visual yang masif ini secara kolektif berkontribusi pada proses Intermedia Agenda Setting. Jessica T. Feezell menjelaskan bahwa di era digital, media sosial sering kali mendahului media massa konvensional dalam menetapkan agenda publik.

Ketika visual dari Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' menjadi viral dan membanjiri linimasa Instagram, terjadi akumulasi tekanan publik yang memaksa jurnalisme arus utama untuk meliput isu tersebut. Mekanisme ini membalikkan arus agenda setting tradisional yang biasanya mengalir dari media ke publik, menjadi arus balik dari publik digital ke media massa. Visual yang kuat dan provokatif di Instagram berfungsi sebagai news peg atau cantolan berita yang menarik bagi editor media daring yang mengejar metrik klik, sehingga isu gerakan mendapatkan amplifikasi

ganda baik di media sosial maupun media berita. Namun, Elisabetta Ferrari memperingatkan tentang risiko manipulasi dalam politik visual, di mana gambar dapat dilepaskan dari konteks aslinya atau decontextualized untuk menyebarkan disinformasi, yang menuntut verifikasi ketat dari audiens.

Kekuatan visual juga terletak pada kemampuannya melakukan pembingkai atau framing yang emosional. Dan Schill mencatat bahwa framing visual lebih kuat dampaknya daripada framing tekstual karena gambar diproses di bagian otak yang berkaitan dengan emosi primal dan ingatan jangka panjang.

Gerakan ini secara konsisten membingkai tuntutan mereka bukan sebagai isu sektarian atau kepentingan golongan tertentu, melainkan sebagai isu kemanusiaan dan keadilan universal. Penggunaan simbol-simbol nasional seperti bendera merah putih dalam desain visual menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindakan patriotik untuk menyelamatkan bangsa, bukan tindakan subversif, yang bertujuan untuk merebut kembali narasi nasionalisme dari tangan negara.

3. Kajian Kausalitas Aktivisme Visual terhadap Kesadaran Politik: Antara Peningkatan Literasi dan Ilusi Pengetahuan

Bagian terakhir dari pembahasan ini mengevaluasi secara kritis dampak kognitif dari aktivisme visual terhadap masyarakat. Literatur akademis menunjukkan adanya paradoks yang menarik dan perlu diwaspadai, yaitu di satu sisi terjadi peningkatan kesadaran atau awareness yang masif, namun di sisi lain terdapat risiko pendangkalan pemahaman atau shallowness yang serius.

Secara positif, aktivisme visual terbukti menjadi pintu masuk atau gateway yang sangat efektif bagi literasi politik pemula. Daniel S. Lane dan rekan-rekan menemukan bahwa ekspresi politik di media sosial merupakan prediktor kuat bagi partisipasi politik luring di masa depan.

Bagi generasi muda yang tidak lagi membaca koran cetak atau menonton berita televisi, infografis Instagram adalah sumber primer informasi politik mereka. Joseph Kahne dan Benjamin Bowyer menambahkan bahwa media digital memungkinkan pemuda untuk melakukan praktik participatory politics, di mana mereka tidak hanya mengonsumsi informasi

secara pasif tetapi juga memproduksi dan mensirkulasikannya, yang secara signifikan meningkatkan political efficacy atau keyakinan diri bahwa tindakan politik mereka berdampak.

Visualisasi data dalam infografis membantu audiens memahami statistik ketimpangan ekonomi, dampak kerusakan lingkungan, atau kerugian negara akibat korupsi yang sebelumnya tampak abstrak dan jauh, menjadi sesuatu yang konkret, personal, dan mendesak.

Namun, terdapat sisi gelap atau dark side dari fenomena ini yang perlu dikritisi secara tajam. Konsep illusion of explanatory depth atau ilusi kedalaman penjelasan yang dibahas oleh Leonid Rozenblit dan Frank Keil menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Audiens sering kali merasa telah memahami sepenuhnya suatu isu kebijakan yang sangat kompleks hanya dengan membaca sepuluh slide infografis di Instagram. Padahal, infografis tersebut telah melalui proses simplifikasi dan reduksi ekstrem yang menghilangkan nuansa, konteks sejarah, detail pasal, dan argumen tandingan yang seimbang. John Postill dalam kajian etnografi dig-

italnya mengingatkan bahwa aktivisme viral sering kali bersifat event-oriented atau berorientasi pada peristiwa sesaat yang meledak-ledak, bukan process-oriented atau berorientasi pada proses advokasi jangka panjang yang tekun.

Kesadaran politik yang dibangun di atas fondasi visual viral rentan bersifat rapuh, dangkal, dan mudah dialihkan ketika tren visual berubah atau ketika algoritma memunculkan topik baru yang lebih sensasional.

Selain itu, algoritma Instagram yang memprioritaskan konten dengan tingkat keterlibatan tinggi cenderung menciptakan echo chambers atau ruang gema dan filter bubbles. Emiliano Treré memperingatkan tentang bahaya "hantu algoritmik" di mana pengguna hanya terpapar pada visual yang mengonfirmasi bias politik dan prasangka mereka sendiri.

Hal ini dapat memperparah polarisasi di tengah masyarakat, di mana setiap kubu politik memiliki realitas visualnya sendiri yang terpisah dan tidak saling berkomunikasi. Dalam konteks Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat', pendukung gerakan mungkin terus menerus dibombardir dengan visual kekerasan aparat yang memicu

kemarahan, sementara penentang gerakan mungkin terpapar visual kemacetan lalu lintas atau vandalisme akibat demonstrasi, sehingga sulit tercapai dialog deliberatif yang sehat dan saling memahami.

D. Kharisma dan K. Y. S. Putri dalam konteks Indonesia menambahkan analisis semiotika bahwa aktivisme visual di Instagram sering kali terjebak pada estetika protes atau *aesthetics of protest* yang mengkomodifikasi perlawanan menjadi sekadar gaya hidup atau tren sosial.

Ada risiko bahwa partisipasi visual berhenti pada performativitas semata, di mana terlihat politis atau *looking political* di media sosial menjadi lebih penting daripada bertindak politis atau *acting political* dalam perubahan kebijakan nyata. Aktivisme menjadi ajang pameran kebajikan moral (*virtue signaling*) tanpa substansi perjuangan yang riil. Meski demikian, Yannis Theocharis berargumen bahwa tidak adil menilai aktivisme digital sepenuhnya dengan standar aktivisme tradisional. Bentuk-bentuk partisipasi baru ini, meskipun tampak ringan dan performatif, tetap memiliki nilai intrinsik dalam menjaga demokrasi tetap hidup, terutama di tengah

menyempitnya ruang sipil fisik dan meningkatnya represi negara.

Shelley Boulianne dalam meta-analisisnya juga mendukung pandangan bahwa penggunaan media sosial secara umum memiliki efek positif, meskipun kecil, terhadap partisipasi sipil, yang membantah narasi pesimisme total.

Tantangan terbesar ke depan adalah meningkatkan literasi berita (*news literacy*) di kalangan pengguna media sosial. Emily K. Vraga dan Melissa Tully menekankan pentingnya skeptisisme yang sehat terhadap informasi di media sosial untuk memilah antara fakta, opini, dan propaganda visual.

Henry Jenkins menyebut ini sebagai bagian dari *convergence culture* di mana konsumen media harus menjadi partisipan yang aktif dan kritis dalam menegosiasikan makna.

Gerakan sosial seperti '17+8 Tuntutan Rakyat' membuktikan tesis Manuel Castells tentang *Networks of Outrage and Hope*, di mana kemarahan dipicu oleh visual ketidakadilan dan harapan dibangun melalui koneksi viral.

Paolo Gerbaudo menyebutnya sebagai "koreografi perakitan" (*choreography of assembly*) di mana media

sosial mengarahkan tubuh-tubuh fisik untuk berkumpul di ruang publik.

Studi Christiany Juditha tentang agenda setting korupsi juga memperkuat bahwa media sosial kini menjadi pengawas atau watchdog baru yang efektif.

Senada dengan itu, Yanuar Nugroho dan Sofie Syofian menemukan bahwa aktivisme digital di Indonesia mampu membentuk opini publik yang menekan pemerintah untuk menunda atau membatalkan kebijakan kontroversial.

Terakhir, studi L. S. Wijaya dan A. D. Savitri tentang pembingkai visual gerakan mahasiswa menunjukkan bahwa Instagram adalah alat mobilisasi yang paling ampuh saat ini karena kedekatannya dengan budaya visual anak muda.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa aktivisme visual di Instagram adalah pedang bermata dua yang kompleks. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk menetapkan agenda publik dan memobilisasi massa melalui emosi dan estetika yang memikat, namun juga menuntut literasi digital tingkat lanjut dari audiens untuk membedakan antara simplifikasi retorik yang manipulatif dan realitas kebijakan yang substantif.

Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' berhasil memanfaatkan momentum visual ini untuk mendesak agendanya, membuktikan bahwa di era kontemporer, kekuasaan politik semakin bergantung pada kekuasaan atas layar, citra, dan narasi visual.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme visual di Instagram telah menjadi elemen sentral dalam dinamika demokrasi kontemporer di Indonesia, khususnya melalui Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat'. Media sosial tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap aksi politik luring, melainkan sebagai infrastruktur utama yang memfasilitasi partisipasi politik berbasis *connective action*. Strategi retorika visual melalui infografis, meme, dan video pendek terbukti efektif dalam membentuk agenda publik, meningkatkan visibilitas isu, serta menekan media arus utama untuk melakukan peliputan. Namun, di balik efektivitas tersebut, aktivisme visual juga mengandung paradoks berupa risiko pendangkalan pemahaman, ilusi pengetahuan, polarisasi algoritmik, dan performativitas politik. Oleh karena itu,

kualitas demokrasi digital sangat ditentukan oleh tingkat literasi visual dan politik masyarakat. Aktivisme visual memiliki potensi besar sebagai sarana demokratisasi, tetapi hanya akan berkelanjutan dan bermakna apabila diimbangi dengan kesadaran kritis, pemahaman substantif, dan orientasi advokasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, W. Lance, and Alexandra Segerberg. *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Highfield, Tim. *Social Media and Everyday Politics*. Cambridge: Polity Press, 2016.
- McCombs, Maxwell E., and Donald L. Shaw. "The Agenda-Setting Function of Mass Media." *Public Opinion Quarterly* 36, no. 2 (1972): 176-187.
- Lim, Merlyna. "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 636-657.
- Nugroho, Yanuar, and Syofian, Sofie. "Digital Activism in Indonesia: The Role of Social Media in Shaping Public Opinion." *Journal of Asian Public Policy* 15, no. 2 (2022): 120-138.
- Pratama, Budi, and Lestari, Puji. "Hashtag Activism and the Omnibus Law Protests in Indonesia: A Connective Action Analysis." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 37, no. 4 (2021): 201-217.
- Wijaya, L. S., & Savitri, A. D. "Visual Framing of 'Gejayan Menggil': Instagram as a Tool for Student Movement Mobilization." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 2 (2020): 112-125.
- Suju, A., & Niam, Z. "From Collective to Connective: The Transformation of Social Movements in the Digital Age." *Indonesian Journal of Communication Studies* 14, no. 1 (2021): 45-58.
- Treré, Emiliano. "The Dark Side of Digital Politics: Understanding the Algorithmic Phantoms of the Web." *New Media & Society* 23, no. 1 (2021): 12-28.
- Pond, Philip, and Lewis, Jeff. "Riots and Twitter: Connective Politics, Social Media and Chaos." *Information, Communication & Society* 22, no. 2 (2019): 213-231.
- Barnidge, Matthew. "Testing the 'Inadvertent' Audience? Visual Political Information on Social

- Media and Political Participation." *Journal of Broadcasting & Electronic Media* 64, no. 2 (2020): 215-235.
- Fahmy, Shahira. "Visual Communication in the Digital Age: The Role of Images in Politics." *Mass Communication and Society* 23, no. 4 (2020): 450-472.
- Kharisma, D., & Putri, K. Y. S. "Analisis Semiotika Visual pada Akun Instagram Aktivisme Lingkungan di Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 6, no. 1 (2021): 88-101.
- Rusmann, Uta, and Svensson, Jakob. "Studying Organizations on Instagram: Visual Rhetoric and the Affordances of the Image." *Social Media + Society* 3, no. 4 (2020): 1-12.
- Feezell, Jessica T. "Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era." *Political Research Quarterly* 71, no. 2 (2018): 482-494.
- Juditha, Christiany. "Intermedia Agenda Setting pada Pemberitaan Kasus Korupsi di Media Online dan Media Sosial." *Jurnal Pekommas* 5, no. 2 (2020): 155-166.
- Luo, Y., & Burley, H. "Agenda-setting on Social Media: A Meta-analysis." *Telematics and Informatics* 63 (2021): 101669.
- Kahne, Joseph, and Bowyer, Benjamin. "Educating for Democracy in a Partisan Age: Confronting the Challenges of Motivated Reasoning and Misinformation." *American Educational Research Journal* 54, no. 1 (2017): 3-34.
- Lane, Daniel S., et al. "The Science of Social Media Expressive Political Action: How Social Media Use Predicts Political Participation." *Journal of Information Technology & Politics* 16, no. 3 (2020): 239-254.
- Nugraha, A. R., & Hidayat, M. "Literasi Politik Digital: Pengaruh Konten Instagram terhadap Partisipasi Politik Generasi Z." *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 34-47.
- Velasquez, A., & LaRose, R. "Youth Collective Activism in Social Media: The Role of Collective Efficacy." *Youth & Society* 47, no. 6 (2020): 899-923.
- Matamoros-Fernández, Ariadna. "Platformed Racism: The Mediation and Circulation of Racism on Social Media." *Information, Communication & Society* 20, no. 6 (2021): 930-946.
- Theocharis, Yannis. "The Conceptualization of Digitally Networked

Participation." *Social Media + Society* 1, no. 2 (2020): 1-14.

Tufekci, Zeynep. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven: Yale University Press, 2017.

Warren, A. M., Sulaiman, A., & Jaafar, N. I. "Social Media Effects on Fostering Online Civic Engagement and Building Citizen Trust and Trust in Institutions." *Government Information Quarterly* 31, no. 2 (2020): 291-301.